

KAJIAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) (Studi Kasus pada Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan)

Sarah Salsabilah¹, Lucky Nugroho², Zulfahmi³

^{1,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana

Corresponding Author: lucky.nugroho@mercubuana.ac.id²

Article History

Received : 06-06-2023

Revised : 13-06-2023

Accepted : 15-06-2023

**Kata Kunci: Kemiskinan;
Penggunaan Dana Bantuan;
Program Keluarga Harapan**

**Keywords: Family Hope Program;
Poverty; Use of Aid Funds**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas pelaksanaa program pemerinta yaitu progrma keluarga harapan (PKH). Metode yang digunakan adalah kualitatif yaitu melakukan observasi lapangan terhadap penerima manfaat dari program PKH dengan jumlah sampel sejumlah 55 kepala keluarga penerima PKH. Lebih lanjut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (i) Bagaimana penyaluran PKH dan Berapa jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menerima atau mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH)?; (ii) Bagaimana penggunaan PKH oleh KK penerima program tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini adalah (i) Penyaluran dana PKH melibatkan mitra yaitu bank penyalur dan banyaknya KK yang mendapatkan dana bantuan PKH sebanyak 519 KK di tahun 2023; (ii) Penggunaan dana bantuan PKH telah sesuai dengan peruntukannya. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan informasi dan referensi berkaitan dengan Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun keterbaruan dalam penelitian ini berkaitan dengan implementasi dan penggunaan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia khususnya di Kelurahan Pekayon Jaya, Bekasi.

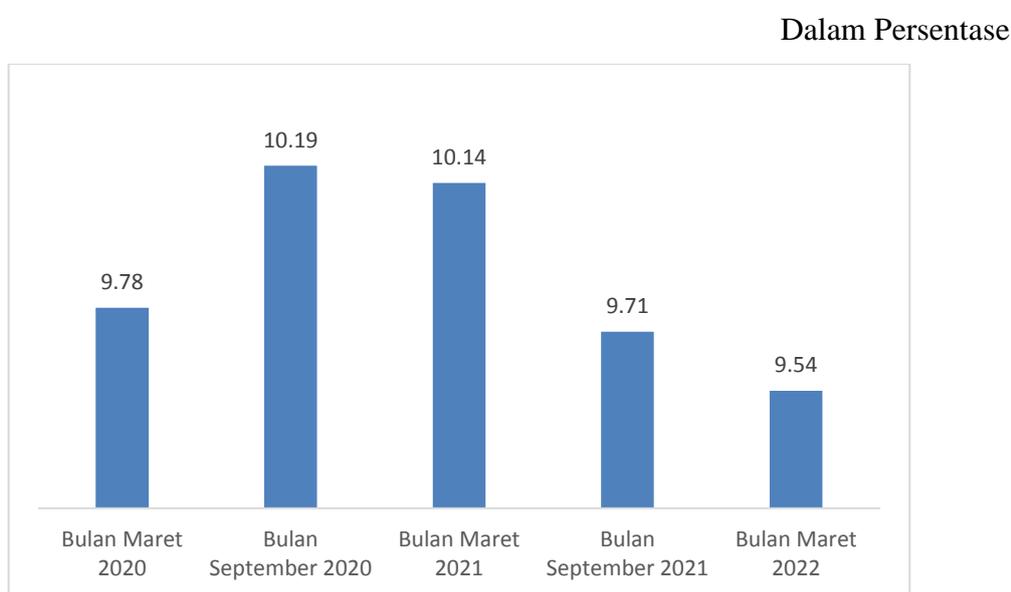
ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of implementing the government program, namely the Family Hope Program (PKH). The method used is qualitative, namely conducting field observations of beneficiaries of the PKH program with a sample size of 55 heads of PKH recipient families. Furthermore, the problem formulations in this study are (i) How is the distribution of PKH and how many heads of families (KK) receive or get the Family Hope Program (PKH); (ii) How is the use of PKH by KK recipients of the program. The results of this study are (i) The distribution of PKH funds involves partners, namely channeling banks, and the number of families who get PKH assistance funds is 519 families in 2023; (ii) The use of PKH assistance funds is following its designation. The implication of this research is to provide

information and references related to the effectiveness of implementing the Family Hope Program (PKH) in Pekayon Jaya Village, South Bekasi District. The novelty in this research is related to the implementation and use of the Family Hope Program (PKH) funds in Indonesia, especially in Pekayon Jaya Village, South Bekasi District, Bekasi City, West Java Province.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan isu yang menakutkan di dunia, khususnya di Indonesia, sehingga menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia. Kepemilikan alat produksi, produktivitas, dan tingkat pembangunan masyarakat, serta penggunaan program pembangunan nasional, merupakan unsur-unsur yang mempengaruhi kemiskinan di masyarakat. Dengan kata lain, kurangnya akses terhadap kepemilikan dan penggunaan faktor-faktor produksi, serta terbatasnya akses terhadap kesehatan dan pendidikan yang memadai, terkait dengan masalah ekonomi struktural (Hasan et al., 2022; Nugroho, 2015; Nugroho et al., 2020). Kemiskinan yang menimbulkan dampak negatif ke berbagai aspek, diantaranya pendidikan yang tidak berkualitas, akses kesehatan yang kurang memadai, kurangnya tabungan dan investasi, kurangnya akses terhadap layanan publik, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan bagi keluarga, serta masalah lainnya yang menyebabkan terjadinya tindakan kriminal dan kejahatan (Anagnostou et al., 2021; Anshary et al., 2021; Tilak, 2002). Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin Indonesia terus mengalami perbaikan dan kondisi tersebut diilustrasikan pada gambar di bawah ini:



Sumber: Annur & Mutia (2022)

Gambar 1. Jumlah Persentase Penduduk Miskin Indonesia
Periode Maret 2020 s.d Maret 2022

Sesuai pada gambar 1 di atas, maka diketahui jumlah kemiskinan Indonesia sudah mengalami perbaikan paska pandemi Covid-19 dimana pada bulan Maret 2020 angka kemiskinan mencapai 9,78% dan menurun sebesar 0,24% pada bulan Maret 2022 menjadi 9,54%.

Lebih lanjut, kemiskinan disebabkan oleh perbedaan pendapatan masyarakat, sehingga terjadi ketimpangan partisipasi dalam kegiatan ekonomi (Arafah & Nugroho, 2016; Nugroho et al., 2017; Rodríguez-Pose & Hardy, 2015). Selain itu, menurut O'Reilly et al. (2017), Kay (2009), Metanfanuan et al. (2021), dan Vidyaningrum et al. (2023) menyatakan bahwa mayoritas kemiskinan pada suatu negara dikontribusi oleh kemiskinan yang terdapat di daerah pedesaan. Penyebab kemiskinan di daerah pedesaan sangat kompleks dan bersifat multi dimensional, antara lain melibatkan faktor budaya, iklim, gender, pasar dan kebijakan publik. Indonesia merupakan salah satu negara sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, sehingga tingkat kesejahteraan rakyatnya berbeda jauh dengan tingkat kesejahteraan di negara maju (Kuznets, 1955; Nguyen et al., 2022). Oleh karena itu, masalah kemiskinan ini masih tetap relevan dan penting untuk dikaji dan diupayakan penanggulangannya, jika tujuan pembangunan nasional yang adil dan merata serta terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya ingin dicapai.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi menggunakan berbagai cara untuk menurunkan angka kemiskinan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yaitu mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan yang diwujudkan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH). Melihat masalah kemiskinan tersebut, Kementerian Sosial Republik Indonesia mengadakan Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya di Kota Bekasi hingga saat ini. Dimana, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu langkah menuju sistem jaminan sosial, yang didirikan pada tahun 2007 oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat untuk keluarga berpenghasilan rendah dan rentan yang termasuk dalam basis data penanggulangan kemiskinan terpadu, ditangani oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial, dan diidentifikasi sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH dijalankan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Serta, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan juga menjadi landasan hukum program tersebut. Program ini menawarkan bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bersyarat, sebuah strategi program bantuan sosial yang selama ini telah digunakan oleh banyak negara. Karakteristik utama dari program bantuan ini adalah bahwa ia membebaskan persyaratan pada perilaku penerima program.

Masalah sosial adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan atau antara apa yang sekarang dan apa yang seharusnya. Masalah sosial dilihat oleh orang-orang dalam masyarakat

sebagai hal yang tidak terduga. Masalah sosial didefinisikan sebagai gangguan moral yang berkembang dalam hubungan interpersonal dan harapan masyarakat yang diharapkan masyarakat untuk dipenuhi. Perilaku menyimpang dan kerusakan sosial adalah jenis masalah sosial umum lainnya. Kemiskinan adalah suatu keadaan sosial ataupun ekonomi untuk menyediakan kebutuhan dasar seseorang, yang tidak dapat disediakan untuk kelangsungan hidup lebih lanjut. Pendapatan rendah dapat didefinisikan sebagai kemiskinan ketika menghalangi orang untuk memenuhi kebutuhan mendasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal (Nugroho & Chowdhury, 2015; Wodon, 1997). Kelaparan, tunawisma, dan kurangnya akses ke perawatan kesehatan merupakan tanda-tanda kemiskinan. Orang miskin biasanya tidak bisa membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak punya pekerjaan, takut akan masa depan, kehilangan anak karena sakit (Herliansyah et al., 2020; Matoenji et al., 2021; Tilak, 2002).

Selanjutnya, terdapat fenomena bahwa Bekasi termasuk salah satu kota termiskin atau merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Propinsi Jawa Barat (Indra, 2022). Oleh karenanya, sesuai dengan fenomena-fenomena di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah (i) Bagaimana penyaluran PKH dan Berapa jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menerima atau mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH)?; (ii) Bagaimana penggunaan PKH oleh KK penerima program tersebut. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menerima atau mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan mengetahui bagaimana penggunaan PKH oleh Keluarga Penerima Manfaat telah sesuai dengan tujuan PKH tersebut. Selanjutnya merujuk dari rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka implikasi dari penelitian ini adalah memberikan informasi dan referensi berkaitan dengan Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan. Adapun keterbaruan dalam penelitian ini berkaitan dengan implementasi dan penggunaan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia khususnya khususnya di Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan di Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat. Sumber data yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini data sekunder yang didapatkan melalui, laporan internal, buku-buku, artikel, yang diperoleh dari website yang berhubungan dengan penelitian ini (Napitupulu et al., 2020; Oktris et al., 2022). Lebih lanjut, untuk melengkapi data sekunder pada penelitian ini adalah melakukan pengambilan data dari Kependudukan dan Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Propinsi Jawa barat. Adapun jumlah sampel yang digunakan sejumlah 55 Kepala Kelurga (KK) penerima PKH. Selain itu, pembahasan pada penelitian

bertujuan untuk menjawab rumusan pada penelitian yang mencakup (i) Bagaimana penyaluran PKH dan Berapa jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menerima atau mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH)?; (ii) Bagaimana penggunaan PKH oleh KK penerima program tersebut?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penyaluran dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Kriteria penerima PKH adalah keluarga miskin yang memenuhi minimal salah satu syarat penerima PKH, adapun persyaratan tersebut sebagai berikut:

- Memiliki komponen kesehatan, yaitu keluarga yang memiliki anak usia 0 sampai dengan 6 tahun, baik penyandang disabilitas ringan maupun berat, serta ibu hamil atau menyusui yang telah terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) tergolong miskin dan rentan miskin.
- Memiliki komponen pendidikan yaitu terdiri dari penduduk miskin dan rentan miskin yang memiliki anak berusia antara 6 sampai 21 tahun yang bersekolah di program sederajat SD/MI, sederajat SMP/MTs, dan SMA/MA sederajat, serta penyandang disabilitas ringan hingga sedang yang memiliki terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT).

Peserta PKH menerima bantuan ini setiap tiga bulan atau setiap empat tahap selama setahun. Bantuan PKH ini diberikan kepada Ibu atau perempuan dewasa (nenek, tante atau kakak perempuan) dan orang-orang ini disebut sebagai Pengurus Keluarga. Dengan pengecualian larangan tersebut di atas, diperbolehkan dalam beberapa keadaan, seperti tidak terdapat perempuan dewasa dalam keluarga, maka dapat digantikan oleh Kepala Keluarga (Bapak atau Ayah). Selanjutnya, pemberian bantuan PKH dikirim ke rekening penerima yang telah yang didaftarkan sebelumnya. Untuk mencairkan PKH tersebut maka bisa langsung ke ATM atau Bank Penyalur menggunakan Kartu KKS (merah putih) sebagai pengganti kartu ATM. Bank umum milik negara yang bekerja sama dengan pihak-pihak PKH sebagai mitra untuk membuat rekening penerima dan menampung uang belanja bantuan PKH sebelum mendistribusikan uang ke Keluarga Penerima Manfaat disebut sebagai "Bank Penyalur".

Kementerian Sosial Republik Indonesia mengadakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan sejak tahun 2012. Kelurahan Pekayon Jaya merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Bekasi Selatan, dimana pada tahun 2022 memiliki 58.145 penduduk yang terdiri dari 28.771 penduduk Laki-laki dan 29.374 penduduk Perempuan, serta jumlah KK di Kelurahan Pekayon Jaya berjumlah 18.049 KK. Berdasarkan Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS), setelah dilakukan verifikasi dan validasi, pada tahun 2023 di Kelurahan Pekayon Jaya terdapat 519 KK yang menerima bantuan PKH.

Penggunaan Dana PKH oleh Keluarga Penerima

Besaran bantuan tunai untuk penerima manfaat PKH bervariasi tergantung pada berapa banyak anggota keluarga yang diikutsertakan dalam mendapatkan bantuan, termasuk komponen kesehatan dan pendidikan. Pada penyaluran bantuan setiap tahapnya dibagi menjadi tujuh kategori penerima, yang dapat dilihat pada tabel Berikut ini:

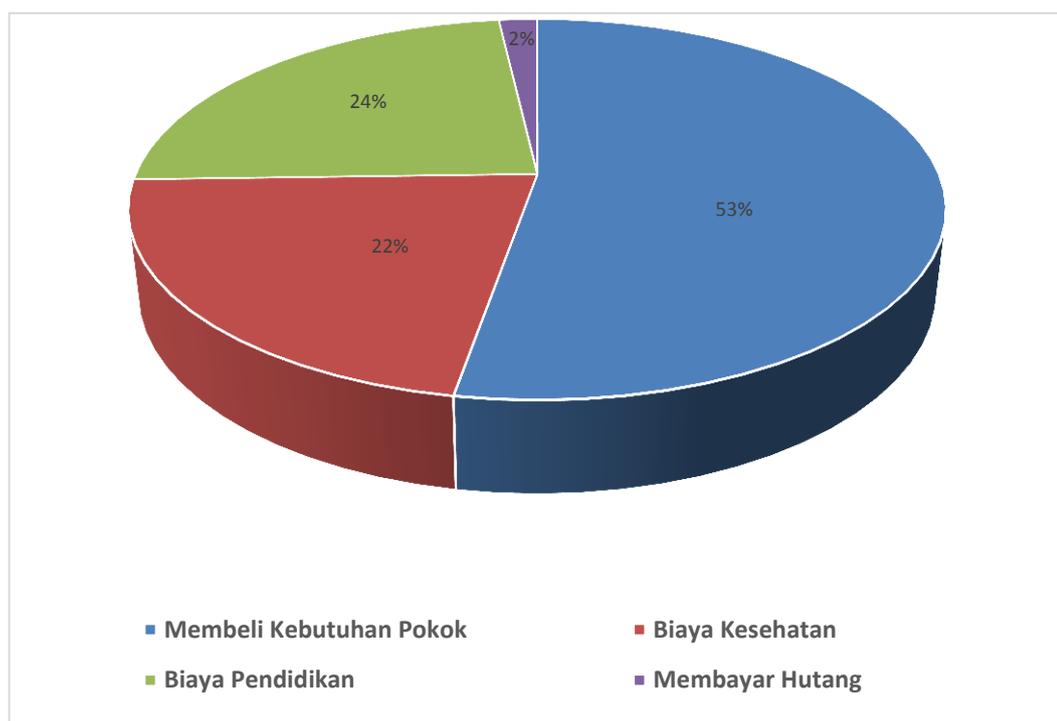
Tabel 1. Skema Bantuan Per tahap Penyaluran PKH

No	Kategori	Jumlah Dana	
		Per 3 Bulan	Total Setahun
1	Ibu Hamil	600,000	2,400,000
2	Anak Usia Dini	600,000	2,400,000
3	Anak SD	225,000	900,000
4	Anak SMP	375,000	1,500,000
5	Anak SMA	500,000	2,000,000
6	Lanjut Usia	600,000	2,400,000
7	Penyandang Disabilitas	600,000	2,400,000

Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia (2019)

Sesuai dengan tabel 1 di atas, maka setiap kategori akan mendapatkan jumlah dana yang berbeda dan penyaluran dana PKH tersebut dilakukan setiap 3 bulan sekali dalam 1 tahun. Dengan demikian, dalam setahun terdapat empat kali tahapan penyaluran dana PKH tersebut. Jika mereka memenuhi kewajiban dan memenuhi persyaratan kepesertaan, semua keluarga berpenghasilan rendah yang mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) berhak menerima bantuan keuangan. Selain itu, karena tidak ada sanksi tegas bagi peserta yang menyalahgunakan bantuan tersebut, diyakini bahwa peserta PKH hanya akan menggunakannya untuk tujuan komponen. Oleh karena itu, agar bantuan dapat digunakan secara efektif, diperlukan partisipasi dan kerja sama dari para peserta dan pendamping.

Pada penelitian ini dilakukan penyebaran kuesioner kepada 55 responden yaitu Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Pekayon Jaya dengan klasifikasi rentang usia antara 25 tahun sampai dengan >50 tahun. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan terkait dengan kesesuaian penggunaan dana PKH penggunaannya sudah sesuai dengan komponen yang ditetapkan oleh Pemerintah, yakni untuk keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan dan kesejahteraan sosial (kebutuhan pokok). Adapun sebagian kecil dari hasil penelitian, responden menggunakan dana tersebut untuk membayar hutang. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. Penggunaan Dana PKH oleh Para Penerima

Sesuai dengan gambar 2 di atas, maka diketahui bahwa mayoritas penggunaan dari dana PKH adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yaitu untuk membeli kebutuhan pokok seperti untuk membeli makanan sebanyak 53% atau sejumlah 29 KK dari 55 KK. Selain dana PKH digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, dana tersebut juga digunakan untuk biaya pendidikan sebesar 23,64% atau sejumlah 13 KK. Lebih lanjut, terdapat 12% atau 12 KK menggunakan dana tersebut untuk keperluan kesehatan. Namun demikian, terdapat 2% atau 1 KK yang menggunakan dana PKH tersebut untuk membayar hutang dengan alasan turunnya dana PKH tidak setiap bulan sehingga mereka harus menutupi biaya kebutuhan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yang notabene masih minus melalui hutang. Dengan demikian, mayoritas yang nota bene 98% atau 54 KK telah menggunakan dana PKH sesuai dengan pertuntutkannya, yaitu untuk membenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan dan kesehatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut:

- Penyaluran dana PKH melibatkan mitra yaitu bank penyalur dan banyaknya KK yang mendapatkan dana bantuan PKH pada Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat sebanyak 519 KK di tahun 2023;
- Penggunaan dana bantuan PKH telah sesuai dengan peruntutkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anagnostou, M., Moreto, W. D., Gardner, C. J., & Doberstein, B. (2021). Linked references are available on JSTOR for this article : Poverty , Pandemics , and Wildlife Crime. *Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment*, 19(4), 294–306. <https://doi.org/10.4103/cs.cs>
- Annur, C. M., & Mutia, A. (2022). *Angka Kemiskinan Indonesia Maret 2022 Terendah Semenjak Pandemi*. Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/21/angka-kemiskinan-indonesia-maret-2022-terendah-semenjak-pandemi>
- Anshary, M., Labetubun, H., Kembauw, E., Hasan, M., Arifudin, O., Yulistiyono, A., Maulina, D., Tanjung, R., Nopralia, S., Siti, H. & Mustamin, W., Rachmarwi, W., Hartoto, M., Azizi, R. T., Siregar, A., & Solikin, L. N. (2021). *Sistem Ekonomi Indonesia* (first). Widina Bhakti Persada Bandung. www.penerbitwidina.com
- Arafah, W., & Nugroho, L. (2016). Maqhashid Sharia in Clean Water Financing Business Model at Islamic Bank. *International Journal of Business and Management Invention (IJBMI)*, 5(2), 22–32.
- Hasan, M., Hartoto, H., Abdelina, A., Riyaldi, M. H., Aswanto, A., Akbar, T., Juliansyah, R., Talakua, B. A., Firmansyah, H., Nugroho, H., Ferdinandus, A. Y., Sattar, S., Apriyeni, D., & Nugroho, L. (2022). Ekonomi Pembangunan Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis. In R. Septiani (Ed.), *Widina Media Utama*. Widina Media Utama.
- Herliansyah, Y., Nugroho, L., Ardilla, D., & Putra, Y. M. (2020). The Determinants of Micro , Small and Medium Entrepreneur (MSME) Become Customer of Islamic Banks (Religion, Religiousity and Location of Islamic Banks). *The 1st Annual Conference Economics, Business, and Social Sciences*, 1–10. <https://doi.org/10.4108/eai.26-3-2019.2290775>
- Indra. (2022). *Kabupaten Bekasi Miskin Ekstrem*. Radarbekasi.Id. <https://radarbekasi.id/2022/04/18/kabupaten-bekasi-miskin-ekstrem/>
- Kay, C. (2009). Development strategies and rural development: Exploring synergies, eradicating poverty. *Journal of Peasant Studies*, 36(1), 103–137. <https://doi.org/10.1080/03066150902820339>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2019). *Program Keluarga Harapan (PKH)*. Kemensos RI.
- Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. *Academy of Management Review*, 45(1), 1–28.

- Matoenji, E. Y., Nugroho, L., & Soeharjoto. (2021). Determinasi Pertumbuhan Laba Bank Syariah Berdasarkan Aspek Pembiayaan UMKM, Jumlah Outlet dan Kualitas Pembiayaan. *Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan (SIKAP)*, 6(1), 125–140.
- Metanfanuan, T., Herlambang, M. A. T., Krishernawan, I., L, N. P., Ginting, S., Sutarman, Supriyanto, E. E., & Nugroho, L. (2021). *Konsep Pembangunan dan Pengembangan Desa Digital*.
- Napitupulu, D., Nugroho, L., Fauzi, A., Permana, S. D. H., Lutfiyana, N., Setyawati, I., Bahri, A. S., Samosir, R. S., Ananto, P. D., Tallo, A. J., & Nisa, B. (2020). *Mudah Membuat Skripsi/Tesis (Pertama)*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Nguyen, T. V. H., Vu, T., & Nguyen, H. (2022). How do banks price liquidity? The role of market power. *Global Finance Journal*, 53, 1–22.
<https://doi.org/10.1016/j.gfj.2022.100736>
- Nugroho, L. (2015). Islamics Principles versus green microfinance. *European Journal of Islamic Finance*, 3, 1–10. <http://www.ojs.unito.it/index.php/EJIF>
- Nugroho, L., & Chowdhury, S. L. K. (2015). Mobile Banking for Empowerment Muslim Women Entrepreneur: Evidence from Asia (Indonesia and Bangladesh). *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 9(1), 83–100.
- Nugroho, L., Mastur, A. A., Harnovinsah, & Aryanti, W. (2020). The Contribution of Islamic Bank in Poverty Alleviation. *Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 30(1), 19–38.
- Nugroho, L., Utami, W., Akbar, T., & Arafah, W. (2017). The Challenges of Microfinance Institutions in Empowering Micro and Small Entrepreneur to Implementating Green Activity. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 7(3), 66–73.
<http://www.econjournals.com>
- O'Reilly, K., Dhanju, R., & Goel, A. (2017). Exploring “The Remote” and “The Rural”: Open Defecation and Latrine Use in Uttarakhand, India. *World Development*, 93, 193–205. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.12.022>
- Oktris, L., Tarmidi, D., Nugroho, L., Anasta, L., & Fadjareni, A. (2022). *Tips & Trik Cara Praktis Menyusun Skripsi dan Tesis (Pertama)*. Pustaka Pranala.
- Rodríguez-Pose, A., & Hardy, D. (2015). Addressing poverty and inequality in the rural economy from a global perspective. *Applied Geography*, 61, 11–23.
<https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2015.02.005>

- Tilak, J. B. G. (2002). Education and Poverty. *Journal of Human Development*, 3(2), 191–207. <https://doi.org/10.1080/14649880220147301>
- Vidyaningrum, C. N., Nugroho, L., & Sugiarti, D. (2023). Analisa Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul). *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 156–164.
- Wodon, Q. T. (1997). Food energy intake and cost of basic needs: Measuring poverty in Bangladesh. *Journal of Development Studies*, 34(2), 66–101. <https://doi.org/10.1080/00220389708422512>